



# LAPORAN TAHUN 2023

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA)

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL

## A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

## B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul berada di Lobby Ruang Utama dan telah memiliki Ruangan Desk Layanan Informasi Publik. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu ber-AC, TV/monitor, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.
2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.

*“Ruang Informasi pada PPID Pelaksana DPUPKP telah dilengkapi dengan fasilitas dan sarana yang memadai serta nyaman bagi para pemohon informasi”*

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

| Hari             | Waktu Pelayanan | Waktu Istirahat |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Senin s.d. Kamis | 09.00 - 15.00   | 12.00 – 13.00   |
| Jum'at           | 09.00 – 15.00   | 11.00 – 13.00   |

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
- b. Fax. 0274 367310
- c. E-mail : [dinas.pupkp@bantulkab.go.id](mailto:dinas.pupkp@bantulkab.go.id)
- d. Telepon : 0274 - 367310
- e. Website DPUPKP Kabupaten Bantul : [dpupkp.bantulkab.go.id](http://dpupkp.bantulkab.go.id)

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 belum dianggarkan secara khusus. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah numenklatur kegiatan PPID tidak ada sehingga tahun 2023 kami tidak bisa menganggarkan kegiatan PPID Pelaksana secara khusus, akan tetapi pelaksanaan kegiatan PPID masuk dalam Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

## C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui E-Mail dan melalui desk layanan informasi. Data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Data Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

| Bulan         | Permohonan Informasi |            |          | Sengketa Informasi (Jika Ada) | Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi | Alasan Penolakan (Jika Ada) |
|---------------|----------------------|------------|----------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
|               | Jumlah               | Diterima   | Ditolak  |                               |                                                |                             |
| Januari       | 9                    | 8          | 4        | -                             | 5-30 menit                                     | Bukan Kewenangan            |
| Februari      | 15                   | 14         | 1        | -                             | 5-30 menit                                     | Bukan Kewenangan            |
| Maret         | 8                    | 8          | 0        | -                             | 5-30 menit                                     | -                           |
| April         | 8                    | 7          | 1        | -                             | 5-30 menit                                     | Bukan Kewenangan            |
| Mei           | 15                   | 15         | 0        | -                             | 5-30 menit                                     | -                           |
| Juni          | 9                    | 9          | 0        | -                             | 5-30 menit                                     | -                           |
| Juli          | 10                   | 10         | 0        | -                             | 5-30 menit                                     | -                           |
| Agustus       | 11                   | 10         | 1        | -                             | 5-30 menit                                     | Bukan Kewenangan            |
| September     | 6                    | 6          | 0        | -                             | 5-30 menit                                     | -                           |
| Oktober       | 12                   | 12         | 0        | -                             | 5-30 menit                                     | -                           |
| November      | 16                   | 16         | 0        | -                             | 5-30 menit                                     | -                           |
| Desember      | 11                   | 10         | 1        | -                             | 5-30 menit                                     | Bukan Kewenangan            |
| <b>Jumlah</b> | <b>130</b>           | <b>125</b> | <b>5</b> | -                             | 5-30 menit                                     | -                           |

*“Terdapat 130 permohonan informasi dan terdapat 5 permohonan tidak dapat diterima dan dipenuhi karena bukan menjadi kewenangan DPUPKP”*

## D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik sesuai tabel berikut :

Tabel 2. Data Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik Tahun 2023

| No | Uraian                                                                                                           | Jumlah       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Jumlah keberatan yang diterima                                                                                   | 0 pengajuan  |
| 2  | Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik                                     | 0 tanggapan  |
| 3  | Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang                                       | 0 permohonan |
| 4  | Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik | 0 putusan    |
| 5  | Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan                                                                       | 0 gugatan    |
| 6  | Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik                                                    | 0 putusan    |

## E. Kendala/Permasalahan Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

### 1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 adalah masih minimnya pemohon informasi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, mungkin karena PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.

### 2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023, antara lain:

- a) Pelaksanaan kegiatan belum dianggarkan secara khusus dalam satu kegiatan.
- b) Belum semua SDM pada Dinas PUPKP mengetahui tentang PPID Pelaksana dan tugasannya

**“Kegiatan PPID Pelaksana belum teranggarkan secara khusus”**

## F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran.

The background of the slide features a close-up, vertical view of a wood grain. The grain lines are curved and concentric, creating a circular pattern. The colors range from light tan and beige to deep browns and dark, almost black, tones. A solid purple rectangular area is positioned on the right side of the slide, partially overlapping the wood grain. A white rectangular box is centered on the left side of the purple area, containing the title text.

*Partisipasi PPID Pelaksana  
DPUPKP dalam  
Monitoring dan Evaluasi  
Keterbukaan Informasi Publik*



## G. Monev Keterbukaan Informasi Publik

Pada Tahun 2023 Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menyelenggarakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Pasal 23 UU KIP dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk melaksanakan evaluasi layanan informasi publik di Badan Publik dan mengumumkannya ke publik.

**“DPUPKP merupakan badan publik informatif sesuai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY”**

Berdasarkan pemeringkatan hasil monev tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul memperoleh Peringkat 59 dari 162 badan publik pada Kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY dengan nilai 93 dan masuk kategori badan publik “Menuju Informatif”. Hal ini menjadi tantangan ke depan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan atau meningkatkan peringkat dimaksud. Jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, hasil monev keterbukaan informasi public Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami fluktuasi naik turun. Selengkapnya, hasil monev seperti pada Tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Monev Keterbukaan Informasi pada DPUPKP Tahun 2017 - 2022

| No | Uraian                          | Tahun |      |      |            |            |            | 2023       |
|----|---------------------------------|-------|------|------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                 | 2017  | 2018 | 2019 | 2020       | 2021       | 2022       |            |
| 1  | Nilai                           | 43,95 | -    | 6,97 | 98,38      | 93,45      | 96,03      | 93         |
| 2  | Kategori                        | -     | -    | -    | Informatif | Informatif | Informatif | Informatif |
| 3  | Peringkat                       | 9     | -    | 119  | 4          | 32         | 35         | 59         |
| 4  | Jumlah OPD yang mengikuti Monev | n/a   | n/a  | n/a  | n/a        | 162        | 162        | 162        |

Berdasarkan hasil monev tersebut, menjadi tantangan ke depan bagi PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi publik dan meningkatkan peringkat sebagai upaya untuk menjadi badan publik yang informatif.

## H. Kegiatan Tahun 2023

### Kegiatan PPID Pelaksana DPUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2023

| No. | KEGIATAN                                                                                       | PELAKSANAAN             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | Mengelola konten website PPID                                                                  | Januari – Desember      |
| 2   | Rapat Koordinasi Internal PPID Pelaksana                                                       | Setiap Bulan Sekali     |
| 3   | Mengikuti Sosialisasi Daring Monev Keterbukaan Infomasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2023         | 11 April 2023           |
| 4   | Mengikuti Workshop peningkatan kesadaran keamanan informasi                                    | 17 Mei 2023             |
| 5   | Mengikuti Pendampingan pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023             | 6 Juni 2023             |
| 6   | Melakukan fasilitasi permohonan pengembangan dan asesmen aplikasi webgis irigasi ke Diskominfo | Oktober – November 2023 |
| 7   | Mengikuti Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Penyerahan Piagam Penghargaan  | 20 Oktober 2023         |
| 8   | Mengikuti pertemuan admin medsos OPD                                                           | 24 Oktober 2023         |
| 9   | Penyusunan Laporan PPID Pelaksana Tahun 2022                                                   | 31 Desember 2023        |

Demikian Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat dan memacu kami untuk lebih meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Mengetahui,  
Kepala Dinas



ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19640617 198703 1 009

Bantul, 5 Januari 2024  
Ketua PPID Pelaksana,



BUDI SARDJONO, ST., M.Ling  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19710930 199903 1 002